LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - April 2026

JUDUL

"Transformasi Tata Kelola Pembangunan Berbasis Big Data Desa Terintegrasi di Kabupaten Klungkung"

Fokus Strategis

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Tim Ahli

Prof. Dr. Ir. I Made Oka Widyantara, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng.

Tenaga Ahli Bidang Teknologi Informatika

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang- Pembangunan daerah pada era digital mengalami perubahan paradigma dari pendekatan administratif menuju pembangunan berbasis data (data-driven development). Dalam paradigma ini, data tidak lagi diposisikan hanya sebagai kebutuhan pelaporan, tetapi menjadi fondasi utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah. Pemerintah daerah dituntut memiliki kemampuan untuk memahami kondisi masyarakat secara lebih rinci, aktual, dan terukur melalui sistem data yang terintegrasi.

Dalam konteks Kabupaten Klungkung, kebutuhan terhadap tata kelola pembangunan berbasis data menjadi semakin penting karena karakteristik wilayah dan dinamika pembangunan yang beragam antar desa. Namun demikian, sistem tata kelola data pembangunan saat ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti:

- data yang bersifat sektoral dan terpisah antar perangkat daerah,
- duplikasi pendataan,
- keterbatasan data mikro tingkat desa, serta
- belum optimalnya integrasi data spasial dan pemanfaatan data dalam pengambilan kebijakan.

Sebagai upaya menjawab permasalahan tersebut, Perintah Kabupaten Klungkung sebelumnya telah mengembangkan kajian **Klungkung Data Desa Presisi**. Kajian tersebut menempatkan desa sebagai fondasi utama pembangunan berbasis data melalui pendekatan

pendataan berbasis sensus, data spasial, dan partisipasi masyarakat. Dalam kajian tersebut dikembangkan konsep:

- Sistem Informasi Desa (SID), aplikasi survei desa,
- dashboard eksekutif, serta
- integrasi data desa ke tingkat kabupaten.

Selanjutnya, kajian tersebut dikembangkan melalui kajian Transformasi Tata Kelola Pembangunan Berbasis Big Data Desa Terintegrasi di Kabupaten Klungkung. Kajian ini menekankan bahwa data desa tidak boleh berhenti sebagai basis data administratif, tetapi harus dikembangkan menjadi sistem intelijen pembangunan daerah (development intelligence system) yang mendukung:

- pengambilan keputusan berbasis bukti,
- integrasi lintas sektor,
- monitoring pembangunan secara real-time, serta
- pengembangan dashboard analitik pembangunan daerah.

Meskipun kedua kajian tersebut telah membangun fondasi konseptual dan arsitektur sistem data pembangunan daerah, tantangan utama yang masih dihadapi adalah aspek implementasi. Banyak sistem informasi pemerintahan belum berjalan optimal karena:

- belum terintegrasi dengan proses bisnis pemerintahan,
- belum memiliki tata kelola yang jelas, serta
- belum didukung kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia.

Oleh karena itu, diperlukan kajian lanjutan yang secara khusus membahas strategi implementasi ekosistem data desa presisi dan big data desa terintegrasi di Kabupaten Klungkung agar sistem yang telah dirancang dapat diimplementasikan secara efektif, berkelanjutan, dan mampu mendukung transformasi tata kelola pembangunan daerah berbasis data.

I. Maksud dan Tujuan

Maksud

Kajian ini dimaksudkan untuk merumuskan strategi implementasi pengembangan ekosistem Data Desa Presisi dan Big Data Desa Terintegrasi di Kabupaten Klungkung sebagai fondasi transformasi tata kelola pembangunan daerah berbasis data. Kajian ini disusun sebagai lanjutan dari kajian sebelumnya mengenai:

- Klungkung Data Desa Presisi, dan
- Transformasi Tata Kelola Pembangunan Berbasis Big Data Desa Terintegrasi di Kabupaten Klungkung,

dengan fokus pada penguatan aspek implementasi, tata kelola kelembagaan, integrasi sistem, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan data desa dalam mendukung pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Tujuan

Adapun tujuan khusus dari kajian ini adalah sebagai berikut:

- Merumuskan strategi implementasi pengembangan Data Desa Presisi dan Big Data Desa Terintegrasi di Kabupaten Klungkung.
- Mengembangkan model tata kelola kelembagaan dan integrasi sistem data pembangunan berbasis desa.
- Menyusun kerangka integrasi data desa dengan sistem perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah.
- Mengembangkan strategi penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan data desa presisi.
- Merumuskan model pemanfaatan dashboard analitik dan sistem intelijen pembangunan daerah (development intelligence system) berbasis big data desa.
- Menyusun roadmap implementasi ekosistem data desa presisi yang terukur dan berkelanjutan.
- Mendukung transformasi tata kelola pembangunan Kabupaten Klungkung menuju data-driven governance dan predictive governance.

II. Ide dan Gagasan

3.1 Konsep Dasar Strategi Implementasi Ekosistem Data Desa Presisi

Strategi implementasi ekosistem Data Desa Presisi di Kabupaten Klungkung pada dasarnya merupakan tahapan transformasi lanjutan dari dua kajian sebelumnya, yaitu Klungkung Data Desa Presisi dan Transformasi Tata Kelola Pembangunan Berbasis Big Data Desa Terintegrasi di Kabupaten Klungkung. Jika pada kajian pertama fokus utama diarahkan pada pembangunan fondasi data desa yang presisi, dan pada kajian kedua diarahkan pada integrasi big data desa dalam tata kelola pembangunan daerah, maka pada kajian ini fokus utama diarahkan pada bagaimana seluruh sistem tersebut dapat diimplementasikan secara nyata, terukur, dan berkelanjutan dalam praktik pemerintahan daerah.

Dalam konteks ini, implementasi tidak dipahami sekadar sebagai proses pemasangan aplikasi atau pembangunan infrastruktur digital. Implementasi dipahami sebagai proses transformasi tata kelola pembangunan daerah yang melibatkan perubahan sistem kerja pemerintahan, perubahan budaya organisasi, perubahan mekanisme pengambilan keputusan, dan perubahan hubungan antara pemerintah dengan data pembangunan itu sendiri.

Selama ini, sebagian besar sistem informasi pemerintahan dibangun dengan pendekatan teknologi yang berorientasi pada digitalisasi administrasi. Sistem dibuat untuk mempermudah pelaporan, pengarsipan, atau pelayanan administratif. Namun dalam banyak kasus, sistem tersebut belum sepenuhnya mampu menjadi instrumen strategis pembangunan karena:

- data tidak terintegrasi,
- sistem tidak digunakan secara konsisten, serta
- belum terhubung dengan proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.

Karena itu, strategi implementasi Data Desa Presisi di Kabupaten Klungkung diarahkan untuk membangun suatu ekosistem pembangunan berbasis data desa yang tidak hanya berfungsi sebagai sistem informasi, tetapi sebagai sistem pengetahuan pembangunan daerah (development intelligence ecosystem).

Dalam sistem ini, data desa menjadi fondasi utama untuk: memahami kondisi masyarakat, memetakan potensi wilayah,

mengidentifikasi masalah pembangunan, menentukan prioritas program, serta mengevaluasi dampak kebijakan secara lebih presisi. Dengan demikian, desa tidak lagi dipandang hanya sebagai lokasi pelaksanaan program pembangunan, tetapi sebagai: pusat produksi data dan pengetahuan pembangunan daerah.

3.2 Transformasi Paradigma Tata Kelola Pembangunan

Strategi implementasi ekosistem Data Desa Presisi tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan transformasi paradigma tata kelola pembangunan daerah. Selama ini, tata kelola pembangunan cenderung berjalan dengan pendekatan sektoral dan administratif. Setiap perangkat daerah bekerja berdasarkan urusan masing-masing, mengelola data masing-masing, dan menjalankan program berdasarkan kebutuhan sektoralnya sendiri.

Akibatnya, pemerintah daerah sering menghadapi situasi di mana:

- satu masalah memiliki banyak versi data,
- intervensi pembangunan saling tumpang tindih, dan
- pengambilan keputusan tidak memiliki referensi data yang sama.

Sebagai contoh, data kemiskinan yang digunakan perangkat daerah tertentu belum tentu sama dengan data yang digunakan perangkat daerah lainnya. Hal serupa juga terjadi pada data infrastruktur, data sosial, maupun data ekonomi masyarakat. Kondisi ini menyebabkan pembangunan sulit dilakukan secara presisi karena pemerintah tidak memiliki satu sistem pengetahuan pembangunan yang terintegrasi.

Melalui implementasi Data Desa Presisi dan Big Data Desa Terintegrasi, paradigma pembangunan diarahkan menuju: data-driven governance dan predictive governance. Dalam pendekatan ini, pembangunan tidak lagi dilakukan hanya berdasarkan: asumsi, pengalaman administratif, atau target program normatif, tetapi berdasarkan: data aktual, analisis kondisi masyarakat, hubungan antar variabel pembangunan, serta prediksi kebutuhan pembangunan di masa depan.

Perubahan paradigma ini sangat penting karena pembangunan daerah modern membutuhkan kemampuan pemerintah untuk membaca perubahan sosial secara cepat, mengidentifikasi wilayah rentan, memprediksi dampak kebijakan, dan melakukan intervensi secara adaptif. Dengan demikian, data desa presisi tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi menjadi: instrumen utama dalam transformasi tata kelola pembangunan Kabupaten Klungkung.

3.3 Model Ekosistem Implementasi Data Desa Presisi

Strategi implementasi yang dikembangkan dalam kajian ini menggunakan pendekatan i*ntegrated digital governance ecosystem*. Pendekatan ini menempatkan seluruh komponen pemerintahan, data, aplikasi, dan proses bisnis pembangunan dalam satu ekosistem yang saling terhubung. Ekosistem tersebut dibangun bukan hanya untuk memastikan bahwa data dapat tersimpan secara digital, tetapi untuk memastikan bahwa: data dapat mengalir, dapat digunakan lintas sektor, dapat diperbarui secara berkelanjutan, serta dapat mendukung pengambilan keputusan pembangunan.

3.3.1 User Layer: Transformasi Peran Aktor Pembangunan

Lapisan pertama dalam ekosistem implementasi adalah User Layer, yaitu

lapisan yang menggambarkan seluruh aktor yang terlibat dalam sistem Data Desa Presisi. Pada sistem konvensional, desa sering diposisikan hanya sebagai pengumpul data administratif. Namun dalam pendekatan Data Desa Presisi, desa diposisikan sebagai produsen utama data pembangunan daerah. Perubahan posisi ini sangat penting karena desa merupakan ruang paling dekat dengan realitas masyarakat. Seluruh dinamika sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya terjadi secara nyata pada level desa. Karena itu, desa menjadi sumber utama data pembangunan yang paling aktual dan paling kontekstual.

Dalam implementasinya, pemerintah desa tidak hanya bertugas menginput data, tetapi juga melakukan validasi kondisi lapangan, memastikan kualitas data, memperbarui data secara berkala, dan menggunakan data untuk mendukung perencanaan desa. Sementara itu, pemerintah kabupaten berperan sebagai orkestrator sistem, pengelola integrasi data, serta pengendali tata kelola pembangunan berbasis data. Perangkat daerah berfungsi sebagai pengguna data sektoral, analis pembangunan, dan pelaksana intervensi program.

3.3.2 Application Layer: Dari Sistem Informasi menjadi Ekosistem Layanan Data

Lapisan kedua adalah Application Layer, yaitu lapisan yang mencakup seluruh aplikasi dan sistem digital yang digunakan dalam pengelolaan data desa presisi. Dalam implementasi ini, aplikasi tidak diposisikan hanya sebagai alat administrasi, tetapi sebagai medium transformasi tata kelola pembangunan. Sistem Informasi Desa (SID) menjadi pusat utama pengelolaan data desa. Melalui SID, desa tidak hanya menyimpan data penduduk atau administrasi pemerintahan, tetapi juga data aset desa, kondisi sosial ekonomi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, potensi wisata, dan data pembangunan lainnya. Aplikasi survei desa digunakan untuk memastikan bahwa data yang masuk benar-benar mencerminkan kondisi lapangan.

Sistem ini memungkinkan pengumpulan data berbasis lokasi, foto lapangan, koordinat spasial, dan atribut sosial ekonomi masyarakat. Sementara itu, dashboard analitik dikembangkan sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Dashboard tidak hanya menampilkan grafik dan statistik, tetapi harus mampu: membaca tren pembangunan, memetakan wilayah prioritas, mengidentifikasi kerentanan desa, dan mengevaluasi efektivitas program.

3.3.3 Integration Layer: Menghilangkan Fragmentasi Sistem Pemerintahan

Salah satu persoalan terbesar dalam tata kelola pemerintahan modern adalah fragmentasi sistem informasi. Setiap perangkat daerah memiliki sistem masing-masing yang berjalan secara terpisah. Kondisi ini menyebabkan data sulit diintegrasikan dan kebijakan sulit dilakukan secara lintas sektor. Karena itu, lapisan integrasi menjadi inti utama dalam strategi implementasi Data Desa Presisi. Lapisan ini berfungsi menghubungkan SID desa, dashboard pembangunan, sistem perangkat daerah, dan data warehouse kabupaten ke dalam satu mekanisme pertukaran data yang terstandarisasi.

Dalam konteks ini, integrasi bukan hanya integrasi teknologi, tetapi integrasi proses bisnis, tata kelola data, dan pengambilan keputusan pembangunan. Melalui integrasi tersebut, setiap perangkat daerah menggunakan: referensi data pembangunan yang sama. Hal ini sangat penting untuk mengurangi perbedaan data, duplikasi

program, dan ketidaksinkronan kebijakan.

3.3.4 Data Layer: Big Data sebagai Sistem Intelijen Pembangunan

Lapisan data merupakan pusat dari seluruh ekosistem implementasi Data Desa Presisi. Dalam paradigma lama, data sering dipandang hanya sebagai arsip administratif. Namun dalam pendekatan ini, data diposisikan sebagai aset strategis pembangunan daerah. Seluruh data desa diintegrasikan ke dalam data warehouse Kabupaten Klungkung sehingga membentuk big data pembangunan daerah berbasis desa. Big data tersebut mencakup data sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, infrastruktur, budaya, dan pariwisata. Keunggulan utama dari big data ini adalah kemampuannya untuk membaca hubungan antar variabel pembangunan, melakukan analisis spasial, memprediksi tren pembangunan, serta mendukung evaluasi kebijakan secara lebih objektif. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah tidak lagi hanya mengetahui "berapa jumlah masalah", tetapi juga mampu memahami "di mana masalah terjadi, mengapa terjadi, dan intervensi apa yang paling tepat."

3.3.5 Infrastructure Layer: Fondasi Keberlanjutan Sistem

Seluruh ekosistem Data Desa Presisi hanya dapat berjalan apabila didukung oleh infrastruktur digital yang memadai. Karena itu, lapisan infrastruktur menjadi fondasi utama keberlanjutan sistem. Infrastruktur tersebut mencakup cloud server daerah, jaringan komunikasi, keamanan siber, pusat data, dan sistem backup data. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa seluruh desa memiliki konektivitas yang memadai, sistem memiliki keamanan data yang baik, dan kapasitas infrastruktur mampu mendukung integrasi data secara berkelanjutan. Tanpa infrastruktur yang kuat, sistem data desa presisi akan sulit berkembang dan berisiko menjadi proyek digitalisasi yang tidak berkelanjutan.

3.4 Strategi Implementasi Bertahap

Implementasi ekosistem Data Desa Presisi tidak dapat dilakukan secara sekaligus karena menyangkut perubahan sistem kerja, perubahan budaya organisasi, kesiapan SDM, dan kesiapan teknologi. Karena itu, implementasi dilakukan secara bertahap.

- Tahap awal difokuskan pada penguatan fondasi desa presisi melalui standardisasi data, penguatan SID desa, dan pembentukan kapasitas operator desa.
- Tahap berikutnya diarahkan pada integrasi data lintas desa dan pembangunan data warehouse kabupaten.
- Tahap lanjutan difokuskan pada pengembangan dashboard analitik dan sistem monitoring pembangunan daerah.
- Sementara tahap akhir diarahkan pada pengembangan AI analytics, predictive governance, dan sistem rekomendasi kebijakan berbasis data.

Pendekatan bertahap ini penting agar transformasi dapat berjalan secara realistis dan berkelanjutan.

3.5 Dimensi Reflektif dan Tantangan

Implementasi Transformasi tata kelola pembangunan berbasis data desa presisi bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga persoalan budaya pemerintahan dan kesiapan kelembagaan. Salah satu tantangan terbesar adalah perubahan budaya kerja birokrasi. Pemerintahan yang selama ini bekerja berbasis administrasi harus mulai bergerak menuju pemerintahan berbasis analitik data. Selain itu, terdapat tantangan ketimpangan kapasitas antar

desa, keamanan data, keberlanjutan anggaran, dan risiko formalitas digital. Karena itu, implementasi harus dilakukan secara: partisipatif, adaptif, dan berorientasi jangka panjang. Pada akhirnya, implementasi Data Desa Presisi bukan sekadar membangun aplikasi pemerintahan, tetapi membangun fondasi baru tata kelola pembangunan Kabupaten Klungkung yang lebih presisi, terintegrasi, dan berbasis realitas masyarakat desa.

III. Rekomendasi

- Pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi dan tata kelola data dengan menetapkan Data Desa Presisi sebagai referensi utama pembangunan daerah (single source of truth).
- Selain itu, diperlukan pembentukan tim koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan integrasi sistem, sinkronisasi data, dan pengendalian kualitas data pembangunan.
- Dari sisi teknis, pemerintah daerah perlu mengembangkan infrastruktur digital, cloud server, data warehouse kabupaten, serta integrasi sistem lintas perangkat daerah melalui mekanisme interoperabilitas data.
- Penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting melalui pelatihan operator desa, penguatan literasi data, dan pengembangan budaya kerja pemerintahan berbasis data (data culture).
- Implementasi sistem dilakukan secara bertahap, dimulai dari: penguatan Sistem Informasi Desa dan data dasar desa, integrasi big data desa tingkat kabupaten, pengembangan dashboard analitik pembangunan, hingga pemanfaatan AI dan analitik prediktif untuk mendukung predictive governance.
- Selain itu, diperlukan perhatian terhadap keamanan data, perlindungan data pribadi, dan keberlanjutan sistem melalui dukungan regulasi, kelembagaan, dan penganggaran jangka panjang.

Semarapura, 20 Mei 2026
Disahkan oleh:

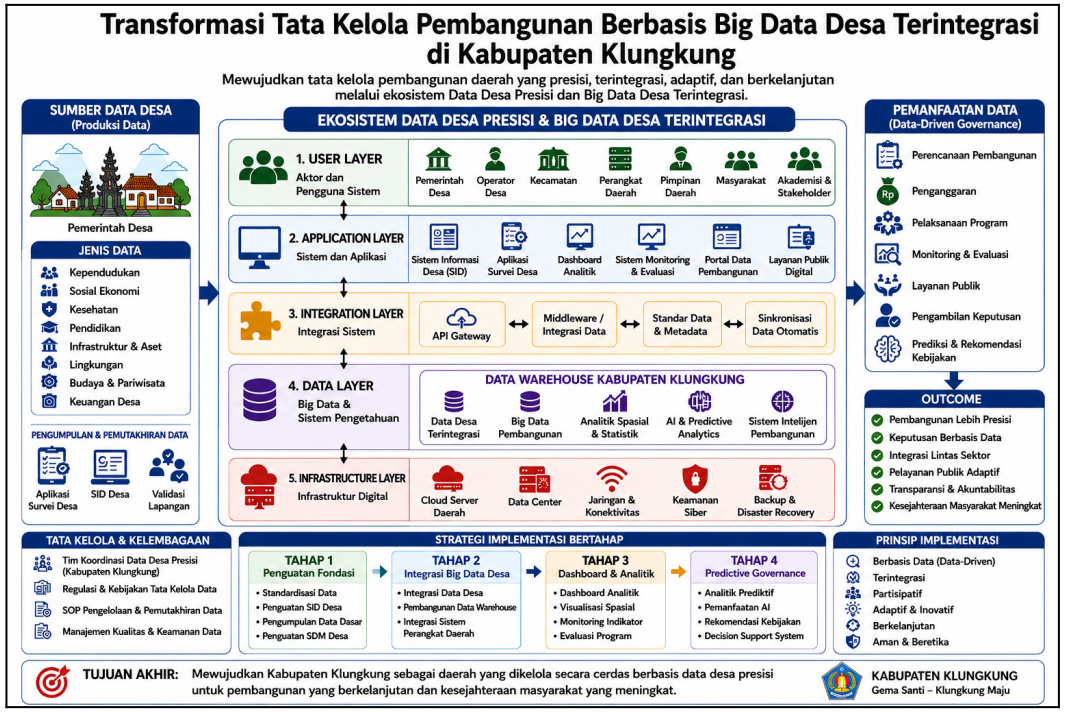


Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

No.	Nama Kegiatan	Hari/Tgl	Lokasi Kegiatan	Materi Kegiatan	Isi Bahasan	Simpulan dan Saran
1.	Musrebang RKPD Kabupaten Klungkung 2027	Kamis/16 April 2026	Praja Mandala	Musrenbang	Secara umum, Rancangan RKPD sudah menunjukkan dua komponen penting. 1. Arah makro RKPD 2027 telah disiapkan melalui kerangka indikator kinerja makro dan target 2027. 2. Sisi fiskal pendapatan daerah, terutama PAD, telah dijabarkan lebih rinci melalui struktur sumber pendapatan, capaian 2025, perkembangan anggaran 2026, jumlah wajib pajak, serta strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Namun demikian, secara substansi perencanaan, paparan masih tampak belum sepenuhnya terintegrasi. Paparan makro RKPD masih terlihat berada pada level sasaran umum, sedangkan paparan PAD lebih operasional, tetapi belum dikaitkan secara eksplisit dengan target-target pembangunan 2027. **1. Keterkaitan antara target makro RKPD dan strategi fiskal belum terlihat kuat** Paparan RKPD 2027 menampilkan indikator kinerja makro dan target 2027, tetapi belum terlihat penjelasan analitis mengenai bagaimana target-target tersebut akan didukung oleh kapasitas fiskal daerah, terutama PAD. Di sisi lain, paparan PAD menunjukkan angka yang cukup rinci, misalnya PAD sebesar Rp 495,30 miliar, pajak daerah Rp 205,08 miliar, dan retribusi daerah Rp 260,27 miliar. Namun, dokumen belum menunjukkan "narasi jembatan" yang menjelaskan kontribusi PAD terhadap pencapaian target pembangunan 2027. **Tanggapan Tim Ahli:** • Terdapat jarak antara dokumen makro-perencanaan dan dokumen pendukung fiskal. Dalam forum RKPD, hal ini berpotensi membuat target-target pembangunan tampak normatif karena tidak dijelaskan basis pembiayaannya secara meyakinkan. • Harus ada pembahasan tentang "Keterkaitan Sasaran RKPD 2027 dengan Strategi Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah"., meliputi: - sektor prioritas yang menopang pertumbuhan ekonomi daerah, - sumber PAD utama yang akan dikuatkan, - bagaimana peningkatan PAD akan menopang pembiayaan program prioritas, - mana target yang dibiayai oleh belanja reguler dan mana yang membutuhkan ruang fiskal tambahan. • Dengan demikian, RKPD menjadi lebih kredibel karena target makro tidak berdiri sendiri, tetapi ditopang oleh strategi fiskal yang jelas. **2. Strategi peningkatan PAD masih bersifat umum dan belum operasional** Paparan PAD telah menyebutkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi, antara lain pendataan WP baru, pertukaran data perpajakan, digitalisasi pembayaran, peningkatan pengawasan, pengembangan Nusa Penida, promosi wisata, inventarisasi aset, desa wisata, dan pemungutan langsung di objek wisata. Strategi ini sudah tepat secara arah, tetapi masih berada pada level umum. Belum tampak rincian implementasi: OPD penanggung jawab, lokasi prioritas, mekanisme, indikator output, serta estimasi tambahan PAD dari masing-masing langkah. **Tanggapan Tim Ahli:** • Strategi yang terlalu umum akan sulit dikawal dalam RKPD, Renja, dan penganggaran. Risiko terbesarnya adalah strategi hanya menjadi daftar niat kebijakan, bukan agenda transformasi. • Setiap strategi intensifikasi dan ekstensifikasi perlu di-breakdown menjadi: - program prioritas, - kegiatan utama, - lokus wilayah, - OPD pelaksana, - indikator output, - indikator outcome, dan estimasi tambahan penerimaan. **3. Kinerja PAD menunjukkan pertumbuhan, tetapi juga mengandung sinyal ketidaksehatan pada beberapa pos** Paparan BPKPD menunjukkan bahwa pajak daerah secara total terealisasi 98,76% pada 2025, sedangkan retribusi daerah 80,47%. Beberapa komponen pajak sangat kuat, misalnya PBJT 107,82%, PBJT tenaga listrik 122,97%, PBJT jasa perhotelan 110,03%, dan PBJT hiburan 315,38%. Namun terdapat pula komponen yang lemah, seperti PBJT jasa parkir 27,00%, pajak air tanah 83,77%, PBB-P2 84,80%, opsen PKB 83,57%, dan opsen BBNKB 72,75%. Pada retribusi, persoalan lebih serius terlihat pada retribusi jasa usaha 42,88%, retribusi pemakaian kekayaan daerah 14,70%, dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga 32,51%. Tanggapan Tim Ahli: • Kondisi ini menunjukkan bahwa PAD Klungkung belum sepenuhnya sehat secara struktur. Ada pos yang kuat karena mengikuti dinamika ekonomi wisata, tetapi ada juga pos yang menunjukkan potensi kebocoran, salah target, lemahnya pengelolaan objek, atau belum optimalnya sistem pemungutan. Artinya, peningkatan PAD 2027 tidak cukup hanya dengan menaikkan target; yang lebih penting adalah memperbaiki kualitas struktur pendapatan. • RKPD 2027 perlu memuat agenda reformasi kualitas PAD, bukan hanya peningkatan nominal PAD. Reformasi tersebut minimal mencakup: - audit potensi dan audit kebocoran untuk pos-pos yang realisasinya rendah, - evaluasi target pada pos yang terlalu ambisius namun tidak realistis, - penetapan klasifikasi pos: stabil, tumbuh, stagnan, dan rawan bocor, - penyusunan strategi yang berbeda untuk tiap klasifikasi. **4. Retribusi jasa usaha dan objek wisata perlu menjadi fokus pembenahan utama** Salah satu anomali paling penting dalam paparan adalah rendahnya capaian retribusi jasa usaha dan tempat rekreasi/olahraga. Target retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar sekitar Rp92,70 miliar hanya terealisasi sekitar Rp30,14 miliar pada 2025, atau 32,51%. Pada 2026, target untuk pos ini bahkan ditingkatkan lagi menjadi sekitar Rp131,89 miliar. Ini perlu dicermati secara serius. Tanggapan Tim Ahli: • Ada tiga kemungkinan: target terlalu tinggi, pengelolaan objek wisata belum efisien, atau terdapat kebocoran/ketidakakuratan sistem pemungutan. Jika ini tidak dievaluasi, maka target 2027 berisiko tidak kredibel. • Pemerintah daerah perlu melakukan review menyeluruh terhadap model bisnis retribusi objek wisata, meliputi: - validasi jumlah kunjungan riil vs penerimaan, - evaluasi tarif, skema penarikan, dan saluran pemungutan, - digitalisasi tiket dan one gate system, - integrasi tiket wisata dengan parkir dan layanan pendukung tertentu, - audit kerja sama pengelolaan objek jika ada pihak ketiga, - evaluasi cost recovery dan margin fiskal tiap objek wisata. • Rekomendasi Tim Ahli adalah menjadikan retribusi destinasi wisata sebagai salah satu agenda prioritas reformasi PAD 2027 karena pengaruhnya signifikan terhadap penerimaan daerah. **5. Nusa Penida sudah tepat disebut sebagai titik ungkit PAD, tetapi pendekatannya perlu ditingkatkan** Paparan menyebutkan Nusa Penida sebagai titik ungkit PAD dengan pengembangan infrastruktur, destinasi wisata, promosi budaya, dan pemungutan langsung di objek wisata. Ini adalah arah yang tepat, apalagi terdapat slide faktor pendukung kunjungan wisatawan ke Nusa Penida. Tanggapan Tim Ahli: • Penyebutan Nusa Penida masih cenderung simbolik. Belum tampak bahwa Nusa Penida diposisikan sebagai kawasan ekonomi fiskal prioritas yang dikelola secara terintegrasi. • Dalam RKPD 2027, Nusa Penida sebaiknya diposisikan sebagai "Revenue Hub Daerah" dengan pendekatan lintas sektor. Artinya, peningkatan PAD dari Nusa Penida tidak hanya dipandang dari tiket wisata, tetapi juga dari: - PBJT hotel dan restoran, - parkir, - penyeberangan, - reklame, - kebersihan dan persampahan, - pemanfaatan aset, - event budaya, - layanan transportasi dan area publik. • Perlu disusun satu paket program khusus "Optimalisasi PAD Kawasan Nusa Penida" yang melibatkan BPKPD, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP, dan OPD pengelola aset. **6. Pemanfaatan aset daerah masih sangat lemah dan harus dinaikkan menjadi agenda strategis** Paparan menunjukkan bahwa inventarisasi barang milik daerah sudah disebut sebagai strategi, tetapi data retribusi pemakaian kekayaan daerah dan pemanfaatan aset masih sangat rendah. Bahkan salah satu pos hanya terealisasi 14,70%. Ini menandakan aset daerah belum dikelola secara produktif sebagai sumber PAD. Tanggapan Tim Ahli: • Pemerintah daerah sering memiliki aset cukup besar, tetapi aset tersebut belum diperlakukan sebagai portofolio ekonomi yang bisa menghasilkan revenue secara legal dan berkelanjutan. • Perlu dimasukkan dalam RKPD 2027 agenda "Transformasi Pemanfaatan Aset Daerah", dengan langkah: - audit ekonomi seluruh aset daerah, - klasifikasi aset: idle, underutilized, productive, strategic, - penyusunan business case per aset prioritas, - skema pemanfaatan seperti sewa, kerja sama pemanfaatan, pemanfaatan ruang komersial, venue event, kios, parkir, atau naming rights sesuai ketentuan, - digitalisasi database aset agar mudah dipetakan untuk revenue planning. **7. Pertumbuhan wajib pajak perlu dikuti strategi konversi menjadi penerimaan efektif** Paparan menunjukkan jumlah wajib pajak terus meningkat, dari 1.448 pada 2023 menjadi 1.883 pada Februari 2026, dengan total 2.264 termasuk yang tidak aktif. Kenaikan terlihat pada hotel, restoran/jasa boga, hiburan, reklame, parkir, dan air tanah. Tanggapan Tim Ahli: • Kenaikan jumlah WP adalah sinyal positif, tetapi pertumbuhan basis data tidak otomatis berarti pertumbuhan penerimaan. Yang lebih penting adalah berapa yang aktif, berapa yang patuh, berapa yang omzetnya valid, dan berapa yang benar-benar memberikan kontribusi. • Perlu pendekatan konversi basis WP menjadi revenue, melalui: - profiling WP aktif dan tidak aktif, - segmentasi WP besar, menengah, kecil, - pengawasan omzet berbasis risiko, - integrasi data izin, usaha, lokasi, dan transaksi, - pendekatan pembinaan bagi WP baru, - penegakan sanksi administratif yang konsisten bagi WP tidak patuh. **8. Belum jelasnya manajemen data pendapatan daerah** Paparan sudah menyinggung pertukaran data perpajakan dan digitalisasi pembayaran. Ini baik, tetapi belum cukup menunjukkan model integrasi data pendapatan daerah secara menyeluruh. Tanggapan Tim Ahli: • Tanpa data yang terintegrasi, pemerintah daerah akan terus menghadapi: - duplikasi data, - objek pajak yang tidak terdeteksi, - sulitnya pengawasan, - lemahnya proyeksi target, dan tingginya potensi kebocoran. • RKPD 2027 perlu mengusulkan pembangunan Sistem Data PAD Terintegrasi yang menghubungkan: - data perizinan usaha, - NIB/OSS, - data PBG/SLF, - data usaha pariwisata - data pasar/parkir, - data aset daerah, - data retribusi objek wisata, dan - data pembayaran elektronik. **9. Penetapan target 2027 harus berbasis proyeksi realistis, bukan sekadar kenaikan incremental** Paparan menunjukkan adanya kenaikan anggaran pajak dan retribusi dari 2025 ke 2026, tetapi juga terdapat beberapa pos yang realisasi awal tahunnya masih rendah. Ini perlu dibaca hati-hati agar target 2027 tidak hanya naik secara administratif tanpa basis proyeksi yang memadai. Tanggapan Tim Ahli: • Jika target ditetapkan terlalu tinggi tanpa reformasi pengelolaan, maka target menjadi semu. Sebaliknya, jika target terlalu rendah, daerah kehilangan peluang fiskal. • Gunakan pendekatan target berbasis evidence, yaitu: - tren historis minimal 3–5 tahun, - seasonal pattern, - pertumbuhan WP, - perkembangan kunjungan wisata, - hasil audit objek, - dampak kebijakan baru, serta - kapasitas pemungutan. • Target 2027 sebaiknya dibagi menjadi: - target dasar (baseline realistis), - target perbaikan (setelah reformasi), - target akselerasi (jika dukungan infrastruktur dan sistem telah siap). **10. PAD belum diposisikan sebagai outcome lintas OPD** Dari paparan yang ada, urusan PAD masih terasa sangat identik dengan BPKPD. Padahal banyak komponen PAD yang sesungguhnya ditentukan oleh kinerja sektor lain: pariwisata, transportasi, pasar, persampahan, perizinan, aset, hingga pengendalian ruang. Tanggapan Tim Ahli: • Bila PAD tetap dipersepsikan sebagai urusan satu OPD, maka upaya peningkatannya akan terbatas pada penagihan. Padahal peningkatan PAD yang sehat harus dibangun dari perbaikan ekosistem ekonomi, layanan publik, tata ruang, dan manajemen aset. • RKPD 2027 perlu menetapkan peningkatan PAD sebagai indikator lintas sektor, sehingga: - Dinas Pariwisata bertanggung jawab pada traffic dan monetisasi destinasi, - Dinas Perhubungan pada parkir dan mobilitas, - DPMPTSP pada validitas usaha formal, - PUPR/teknis bangunan pada validasi objek bangunan, - DLH pada layanan kebersihan, pengelola aset pada revenueisasi aset daerah..	Simpulan: Secara keseluruhan, bahan paparan sudah memberikan fondasi awal yang cukup baik, terutama dari sisi data pendapatan daerah. Akan tetapi, agar rancangan RKPD 2027 menjadi lebih kuat secara perencanaan, dokumen ini masih perlu diperdalam pada aspek integrasi antar-substansi, ketajaman diagnosis masalah, kejelasan pengungkit fiskal, dan operasionalisasi solusi. Tim Ahli menilai bahwa arah kebijakan yang paling penting untuk diperkuat adalah reformasi tata kelola PAD, optimalisasi ekonomi kawasan wisata, pemanfaatan aset daerah, dan integrasi data untuk pengawasan serta proyeksi pendapatan. Jika empat agenda ini dimasukkan secara serius ke RKPD 2027, maka peningkatan PAD tidak hanya menjadi target angka, tetapi menjadi bagian dari transformasi tata kelola pembangunan daerah. Berdasarkan review di atas, Tim Ahli merekomendasikan agar dokumen RKPD 2027 memuat penajaman berikut: 1. Tambahkan narasi dan matriks yang menghubungkan target indikator makro 2027 dengan kapasitas fiskal daerah, terutama strategi peningkatan PAD. 2. Ubah strategi PAD yang masih normatif menjadi program prioritas yang operasional, lengkap dengan OPD penanggung jawab, indikator, lokus wilayah, dan estimasi tambahan penerimaan. 3. Tetapkan reformasi retribusi jasa usaha, khususnya objek wisata/rekreasi, sebagai agenda utama karena deviasi target-realisasinya sangat besar. 4. Jadikan Nusa Penida sebagai kawasan prioritas peningkatan PAD berbasis pendekatan lintas sektor dan integrasi layanan. 5. Masukkan program transformasi pemanfaatan aset daerah sebagai sumber PAD baru yang lebih stabil dan berkelanjutan. 6. Bangun sistem data PAD terintegrasi untuk mendukung pendataan, pengawasan, proyeksi target, dan penindakan atas kebocoran. 7. Gunakan metode penetapan target pendapatan yang lebih realistis dan evidence-based, bukan sekadar incremental budgeting. 8. Tetapkan peningkatan PAD sebagai outcome lintas OPD, bukan hanya tugas BPKPD.

V. Lampiran


Transformasi Tata Kelola Pembangunan Berbasis Big Data Desa Terintegrasi di Kabupaten Klungkung
Mewujudkan tata kelola pembangunan daerah yang presisi, terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan melalui ekosistem Data Desa Presisi dan Big Data Desa Terintegrasi.
SUMBER DATA DESA (Produksi Data)
Pemerintah Desa
JENIS DATA
Kependudukan
Sosial Ekonomi
Kesehatan
Pendidikan
Infrastruktur & Aset
Lingkungan
Budaya & Pariwisata
Keuangan Desa
PENGUMPULAN & PEMUTAKHIRAN DATA
Aplikasi Survei Desa
SID Desa
Validasi Lapangan
EKOSISTEM DATA DESA PRESISI & BIG DATA DESA TERINTEGRASI
1. USER LAYER
Aktor dan Pengguna Sistem
Pemerintah Desa
Operator Desa
Kecamatan
Perangkat Daerah
Pimpinan Daerah
Masyarakat
Akademisi & Stakeholder
2. APPLICATION LAYER
Sistem dan Aplikasi
Sistem Informasi Desa (SID)
Aplikasi Survei Desa
Dashboard Analitik
Sistem Monitoring & Evaluasi
Portal Data Pembangunan
Layanan Publik Digital
3. INTEGRATION LAYER
Integrasi Sistem
API Gateway
Middleware / Integrasi Data
Standar Data & Metadata
Sinkronisasi Data Otomatis
4. DATA LAYER
Big Data & Sistem Pengetahuan
DATA WAREHOUSE KABUPATEN KLUNGKUNG
Data Desa Terintegrasi
Big Data Pembangunan
Analitik Spasial & Statistik
AI & Predictive Analytics
Sistem Intelijen Pembangunan
5. INFRASTRUCTURE LAYER
Infrastruktur Digital
Cloud Server Daerah
Data Center
Jaringan & Konektivitas
Keamanan Siber
Backup & Disaster Recovery
PEMANFAATAN DATA (Data-Driven Governance)
Perencanaan Pembangunan
Penganggaran
Pelaksanaan Program
Monitoring & Evaluasi
Layanan Publik
Pengambilan Keputusan
Prediksi & Rekomendasi Kebijakan
OUTCOME
Pembangunan Lebih Presisi
Keputusan Berbasis Data
Integrasi Lintas Sektor
Pelayanan Publik Adaptif
Transparansi & Akuntabilitas
Kesejahteraan Masyarakat Meningkat
TATA KELOLA & KELEMBAGAAN
Tim Koordinasi Data Desa Presisi (Kabupaten Klungkung)
Regulasi & Kebijakan Tata Kelola Data
SOP Pengelolaan & Pemutakhiran Data
Manajemen Kualitas & Keamanan Data
STRATEGI IMPLEMENTASI BERTAHAP
TAHAP 1
Penguatan Fondasi
• Standardisasi Data
• Penguatan SID Desa
• Pengumpulan Data Dasar
• Penguatan SDM Desa
TAHAP 2
Integrasi Big Data Desa
• Integrasi Data Desa
• Pembangunan Data Warehouse
• Integrasi Sistem Perangkat Daerah
TAHAP 3
Dashboard & Analitik
• Dashboard Analitik
• Visualisasi Spasial
• Monitoring Indikator
• Evaluasi Program
TAHAP 4
Predictive Governance
• Analitik Prediktif
• Pemanfaatan AI
• Rekomendasi Kebijakan
• Decision Support System
PRINSIP IMPLEMENTASI
Berbasis Data (Data-Driven)
Terintegrasi
Partisipatif
Adaptif & Inovatif
Berkelanjutan
Aman & Beretika
TUJUAN AKHIR: Mewujudkan Kabupaten Klungkung sebagai daerah yang dikelola secara cerdas berbasis data desa presisi untuk pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat.
KABUPATEN KLUNGKUNG
Gema Santi – Klungkung Maju